

PENGUNGKAPAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN KABILA BONE MELALUI TINJAUAN KONSEP ENTITAS

Hartati Tuli¹⁾, Mulyani Mahmud²⁾

^{1,2)}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Gorontalo

Email: hartati@ung.ac.id¹⁾, mulyani@ung.ac.id²⁾

Abstrak

Konsep kesatuan usaha (*economic entity concept*) yang menyatakan bahwa seharusnya entitas (dalam hal ini umkm) harus dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya, tapi secara realita masih ada saja pelaku UMKM di Kec. Kabila Bone belum menerapkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan usaha masa akan datang melalui tinjauan konsep entitas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, telah memahami bahwa pemisahan antara milik pribadi dan milik usaha penting, tetapi adapula beberapa pelaku usaha yang tidak mengimplementasikan untuk pemisahan antara milik pribadi dan milik usaha sehingganya pada usaha mikro masih kurang maksimal sehingganya penerapan konsep entitas pun kurang maksimal.

Kata Kunci: Usaha Mikro, Economic Entity Concept, Perkembangan

Abstract

The economic entity concept states that entities (in this case MSMEs) should be considered as independent entities or independent of their owners, but in reality there are still MSME actors in Kabila Bone District who have not implemented this concept. The aim of this research is to determine future business developments through reviewing the entity concept. The method used in this research is descriptive quantitative with the data collection method used is a questionnaire. The results show that micro business actors in Kabila Bone District, Bone Bolango Regency, have understood that the separation between personal and business property is important, but there are also some business actors who do not separate personal and business property so that micro businesses are still not optimal. so the application of the entity concept is also the same.

Keywords: Micro Business, Economic Entity Concept, Business Development

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, UMKM dianggap sebagai unit usaha yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendukungnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dianggap sangat mendukung peningkatan UMKM. Peran UMKM sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, karena menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5%, dan berperan

dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total tenaga kerja nasional. Dengan demikian, UMKM menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional.

Terdapat beberapa ciri UMKM salah satunya yang utama adalah fleksibilitas dalam mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan biaya yang terbilang rendah (Warsono et al., 2010). Namun seiring berkembangnya UMKM dan berperan penting dalam perekonomian negara, terdapat kendala yang dihadapi yaitu terkait dengan manajemen keuangan. Adanya kondisi pengelolaan yang

tidak jelas yang menjadi faktor banyak UMKM gagal. Hal ini tentunya harus diatasi dengan adanya sosialisasi sampai dengan adanya pendampingan kepada para UMKM (Irawan, 2013). Inisiatif utama dalam pengelolaan dana adalah dengan mempraktikkan akuntansi dengan baik.

Akuntansi merupakan suatu proses yang runtut sehingga menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan (Risnansih, 2017). maka dari itu hal ini menjadi sangat penting bagi UMKM untuk melihat perkembangan usaha. Persoalan yang menjadi tantangan sekarang adalah implementasi akuntansi yang nantinya bisa menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, hal ini diakibatkan minimnya pengetahuan, rumitnya siklus akuntansi serta adanya persepsi dari para pelaku UMKM bahwasanya laporan keuangan bukan sesuatu yang penting. Di Indonesia masih banyak UMKM yang belum mempraktikkan akuntansi pembukuan sesuai dengan benar, yang hal ini menjadi penyebab tidak diketahuinya perkembangan usaha tersebut (Murtiningtyas, 2013).

Sehingganya upaya yang perlu ditempuh adalah menerapkan salah satu prinsip akuntansi yaitu konsep entitas dimana adanya pemisah atau satu kesatuan antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Dalam *economic entity concept* dijelaskan untuk suatu organisasi bisnis dianggap usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Implikasinya adalah hubungan antara UMKM dan pemilik diperlakukan sebagai transaksi antara dua pihak yang terpisah. Melalui konsep ini untuk bisa menjaga keberlangsungan dari jalannya usaha dan dapat diketahui progress dari usaha tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan temuan dilapangan bahwa pelaku usaha mikro di Kecamatan Kabila Bone belum mengetahui dan menerapkan konsep entitas dalam menjalankan usahanya.

Hal ini dukung sebagaimana dalam (Tuli, 2021) didapatkan bahwa masih banyak Usaha mikro umumnya belum memahami konsep entitas sebagai panduan dalam menjalankan bisnisnya. Banyak pelaku usaha mikro yang belum memasukkan berbagai komponen biaya yang muncul saat transaksi pembelian ke dalam harga pokok produk yang dijual, sehingga hal ini mengakibatkan pendapatan yang rendah dan bahkan sering

berujung pada kerugian. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nirwana et al., 2023) Permasalahan yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Desa Cinta Damai masih melakukan pencatatan yang sederhana dan tidak menyusun laporan keuangan. Mereka menganggap pembuatan laporan keuangan bukan sesuatu yang penting, bahkan ada yang belum memahami atau menerapkan konsep entitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dasar kesatuan usaha belum diterapkan sesuai prinsip akuntansi, karena para pemilik usaha tidak memisahkan pencatatan pengeluaran usaha dari pengeluaran rumah tangga.

Berbeda dengan penelitian (Risnansih, 2017) permasalahan yang ada bahwa usaha mikro Dhi Sablon dan Printing dalam menjalankan usahanya belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan secara akuntansi dan pemahaman konsep entitas yang masih kurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha mikro tersebut berupaya dalam menjalankan bisnis mengimplementasi *economic entity concept* walaupun belum sepenuhnya. Dengan penerapan tersebut Usaha Mikro ini juga membuat laporan keuangan meskipun secara sederhana. Sama halnya dengan (Muchiballah & Wibowo, n.d.) permasalahan yang diemukan bahwa di Indonesia masih banyak pelaku usaha mikro menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya, hal ini dikarenakan para pelaku usaha belum menerapkan praktik akuntansi dan menganggap usaha mereka berjalan lancar dan masih menghasilkan laba, tetapi sejatinya usaha tersebut tidak berkembang, hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa UMKM dalam mengelola usahanya sudah berdasarkan *economic entity concept*.

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa penerapan konsep entitas hanya pada UMKM yang sudah berkembang pesat dan yang berada pada Kawasan perkotaan, maka dari itu yang menjadi kebaruan penelitian ini yaitu dimana konsep entitas ini akan diterapkan pada usaha mikro yang berada di kawasan pesisir dalam hal ini di kecamatan Kabila Bone demi pengungkapan keberlangsungan usaha mereka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi saat ini dan masa akan datang usaha mikro melalui tinjauan konsep entitas.

2. TELAAH LITERATUR

Konsep Entitas

Konsep entitas atau kesatuan usaha adalah salah satu prinsip dasar dalam akuntansi. Teori ini menegaskan bahwa unit bisnis akuntansi harus dipisahkan dari unit atau individu lain. Tanpa penerapan konsep ini, laporan keuangan akan menjadi tidak teratur, karena mungkin terdapat elemen-elemen keuangan yang tidak terkait dengan organisasi tersebut. (Ismail dkk, 2023).

Hal ini sejalan dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) terkait konsep kesatuan usaha (Economic Entity Concept) yang menyatakan bahwa entitas, seperti UMKM, harus diperlakukan sebagai unit yang mandiri dan terpisah dari pemiliknya. Konsep entitas ini mengimplikasikan bahwa hubungan antara UMKM dan pemiliknya dianggap sebagai transaksi antara dua pihak yang independen.

Usaha Mikro

Salah satu jenis usaha yang menjadi penggerak ekonomi nasional yaitu Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Jenis usaha ini juga dibagi menjadi 3 kelompok yaitu usaha yaitu usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha mikro merupakan jenis kelompok usaha yang menghasilkan pendapatan dan pelakunya adalah masyarakat yang berada pada kategori miskin. Dimana usaha ini memiliki ciri-ciri yaitu modal usaha secara keseluruhan tidak melebihi 10 Juta, sumber daya manusia yang dipekerjakan tidak lebih dari lima orang atau biasanya pelaku sendiri dan keluarga yang menjelakab usaha, serta pemilik dalam menjalankan usahanya mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari (Risnansih, 2017). Contoh usaha mikro antara lain adalah warung kelontong, warung makan, industri kecil seperti pembuatan tempe, kerupuk, dan kecap, jasa tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, tukang las, penjahit, pengrajin, serta usaha kecil dalam bidang pariwisata.

Dalam penjelasan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan bahwa "Usaha Mikro adalah usaha

produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (1) diatur bahwa kriteria untuk dikategorikan sebagai usaha mikro meliputi: memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, dalam metode penelitian ini membandingkan fenomena-fenomena tertentu (Mangopa et al., 2020). Jenis penelitian dengan metode deskriptif yaitu peneliti membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan runtut serta faktual terkait hubungan antar fenomena yang dikaji Nazir (2008) dalam (Risnansih, 2017). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan membagi kuisisioner kepada pelaku usaha. Kuisisioner berisi tentang informasi yang berisi informasi tentang penerapan konsep entitas dalam usaha mikro dan terdapat uraian alasan yang dimintakan dari pada responden.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro yang berada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah populasi 732. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 62 responden yang bersedia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperlukan adalah hasil membagi kuisisioner kepada pelaku usaha di kecamatan kabila bone. Penelitian ini difokuskan pada kondisi keberlangsungan usaha dan penerapan konsep entitas sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan mereka. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dimana data yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner kemudian ditabulasi yang hasilnya akan diinterpretasi dalam bentuk deskriptif sehingga dapat diketahui gambaran tentang implementasi konsep entitas pada UMKM demi keberlangsungan usaha.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Status dalam Perusahaan

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Dalam Perusahaan

Karakteristik	Jumlah Responden	Presentase
Status dalam perusahaan		
• Pemilik	54	87.10 %
• Pengelola	4	6.45 %
• Karyawan	4	6.45 %

Sumber : Data Penelitian (2024)

Sementara itu untuk karakteristik berdasarkan status dalam usaha, responden sebagai pemilik sebanyak 54 responden atau 87.10%, responden sebagai pengelolasebanyak 4 responden atau 6.45%, terakhir responden sebagai karyawan sebanyak 4 responden atau 6.45%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Bulanan Bruto

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Bulanan Bruto

Karakteristik	Jumlah Responden	Presentase
Penghasilan bulanan bruto < 10 Juta	55	88.71 %
10 Juta – 25 Juta	6	9.68 %
25 Juta – 100 Juta	1	1.61 %
>100 Juta	0	0 %

Sumber : Data Penelitian (2024)

Karakteristik terakhir yaitu berdasarkan penghasilan bulanan bruto, responden dengan penghasilan bulanan bruto terbanyak yaitu dari penghasilan kurang dari 10 juta dimana terdapat 55 responden atau 88.71%, kelompok kedua yaitu penghasilan dari 10 juta – 25 juta sebanyak 6 responden atau 9.68%, dan kelompok terakhir yaitu responden dengan penghasil 25 juta – 100 juta perbulan sebanyak 1 responden dengan presentase 1.61%, namun 0 responden atai 0% untuk penghasilan lebih dari 100 juta.

Pada Tabel selanjutnya peneliti menunjukkan hasil pengisian kuisisioner tentang pengungkapan perkembangan usaha mikro kecil di Kecamatan Kabila Bone melalui tinjauan konsep entitas :

Tabel 3. Hasil Pengisian Kuesioner

No	Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Dalam mencatat Kas perusahaan saya memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan	80.65 %	19.35 %
2	Dalam mencatat Piutang perusahaan saya memisahkan antara piutang pribadi dan piutang perusahaan	87.10 %	12.90 %
3	Dalam mencatat Persediaan perusahaan saya memisahkan antara persediaan pribadi dan persediaan perusahaan	75.81 %	24.19 %
4	Dalam mencatat Aset Tetap perusahaan saya memisahkan antara Aset tetap pribadi dan Aset tetap perusahaan	69.35 %	30.65 %
5	Dalam mengeluarkan biaya transport untuk pengadaan barang tidak terdapat biaya transportasi untuk kepentingan pribadi	69.35 %	30.65 %
6	Saya mengakui hutang perusahaan betul-betul merupakan untuk kepentingan usaha tidak untuk kepentingan pribadi	87.10 %	12.90 %
7	Saya mengakui pendapatan perusahaan untuk perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi	80.65 %	19.35 %
8	Saya tidak mencampur adukkan biaya perusahaan dengan biaya untuk kepentingan pribadi	79.03 %	20.97 %

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berikut merupakan hasil jawaban dari masing-masing pernyataan dari semua responden yang didapatkan oleh peneliti :

1. Dalam mencatat Kas perusahaan saya memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan

Tabel 4. Hasil tanggapan responden tentang pencatatan kas perusahaan, pelaku usaha memisahkan antara uang pribadi dan uang Perusahaan

Pernyataan	1
Ya	50
Tidak	12

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 4. terdapat 62 responden yang diantaranya sebanyak 50 responden menjawab “Ya”, maka dalam hal ini responden selalu mencatat kas usahanya yang dimana pencatatannya selalu dipisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Sedangkan 12 responden lainnya menjawab “Tidak”, dalam hal ini responden tidak melakukan pencatatan kas usaha dan tidak memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha.

Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden selaku pemilik, pengelola, maupun karyawan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sudah menyadari pentingnya pemisahan antara kas pribadi dan kas usaha. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, hasil tanggapan dari para responden menyatakan para pelaku usaha memisahkan antara pembelian kebutuhan rumah tangga memakai kas pribadi, pembelian bahan baku atau membayar gaji karyawan menggunakan kas usaha.

Hasil penelitian ini berimplikasi pada Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) terkait konsep kesatuan usaha (Economic Entity Concept), yang menekankan pentingnya pemisahan antara uang pribadi dan uang usaha. Hal ini menegaskan bahwa entitas bisnis merupakan unit yang berbeda dari entitas pribadi pemiliknya, sehingga aset dan kewajiban bisnis tidak tercampur dengan aset dan kewajiban pribadi.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan dalam penelitian ini dimana sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Riyani et.al (2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menyadari penting pemisahan rekening pribadi dan rekening bisnis. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risnarningsih, 2017) menyatakan pemilik usaha mikro kurang disiplin dalam pemisahan pembukuan uang pribadi dan uang usaha dikarenakan tersita waktu untuk pekerjaan.

2. Dalam mencatat Piutang perusahaan saya memisahkan antara piutang pribadi dan piutang perusahaan

Tabel 5. Hasil tanggapan responden tentang pencatatan piutang perusahaan pelaku usaha memisahkan antara piutang pribadi dan piutang perusahaan

Pernyataan	2
Ya	54
Tidak	8

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 5. terdapat 62 responden yang diantaranya sebanyak 54 responden menjawab “Ya”, menyatakan bahwa responden selalu mencatat Piutang usaha dimana para responden selalu memisahkan pencatatan antara piutang pribadi dan piutang usaha. Sedangkan 8 responden lainnya menjawab “Tidak”, dalam hal ini responden tidak melakukan pencatatan piutang usaha sehingganya tidak memisahkan antara piutang pribadi dan piutang usaha.

Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden selaku pemilik, pengelola, maupun karyawan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sudah menyadari pentingnya pemisahan antara piutang pribadi dan piutang usaha. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, hasil tanggapan dari para responden yaitu meminjamkan uang kepada teman atau keluarga menggunakan uang pribadi sehingganya hal tersebut masuk ke dalam piutang pribadi bukan piutang usaha. Sehingganya pemisahan antara piutang pribadi dan piutang usaha sangat penting karenasesuai dengan prinsip akuntansi seperti entitas bisnis yang terpisah (business entity principle) mengharuskan pemisahan ini agar laporan keuangan mencerminkan kinerja dan posisi keuangan usaha secara objektif.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan dalam penelitian ini dimana sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Nirwana et al., 2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memisahkan antara piutang usaha dan piutang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muchiballah & Wibowo, n.d.) menyatakan bahwa para pelaku usaha tidak mencatat piutang usaha dan piutang pribadi, hal ini dikarenakan adanya piutang dengan nominal yang sedikit sehingga mereka tidak mencatatnya dalam buku melainkan hanya diingat saja.

3. Dalam mencatat Persediaan perusahaan saya memisahkan antara persediaan pribadi dan persediaan Perusahaan

Tabel 6. Hasil tanggapan responden tentang pencatatan persediaan perusahaan pelaku usaha memisahkan antara persediaan pribadi dan persediaan perusahaan

Pernyataan	3
Ya	47
Tidak	15

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 6. terdapat 62 responden yang dimana sebanyak 47 responden menjawab “Ya”, menyatakan bahwa responden selalu mencatat Persediaan usahanya dan memisahkan antara persediaan pribadi dan persediaan usaha. Sedangkan 15 responden lainnya menjawab “Tidak”, menyatakan bahwa responden tidak mencatat Persediaan usahanya dan tidak memisahkan antara persediaan pribadi dan persediaan usaha.

Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden selaku pemilik, pengelola, maupun karyawan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sudah menyadari pentingnya pemisahan antara persediaan pribadi dan persediaan usaha. Kecamatan Kabila Bone merupakan Daerah wisata dan hampir semua pelaku usaha bergerak pada bidang kuliner sehingganya hasil tanggapan berdasarkan hasil kuisisioner menyatakan para pelaku usaha dalam hal ini memisahkan antara bahan baku rumah tangga dan bahan baku untuk usaha yang akan dijual. Pemisahan antara persediaan pribadi dan persediaan usaha sangat penting karena sesuai dengan prinsip akuntansi yang mengedepankan kejelasan dan akurasi dalam pencatatan keuangan. Prinsip entitas bisnis yang terpisah (business entity principle) menuntut agar aset dan kewajiban perusahaan tidak bercampur dengan aset dan kewajiban pribadi pemilik atau individu terkait.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan dalam penelitian ini dimana sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Muchiballah & Wibowo, n.d.) yang menyatakan bahwa 25% para pelaku usaha melakukan pemisahan persediaan pribadi dan persediaan usaha sedangkan 75% lainnya tidak melakukan pemisahan persediaan pribadi dan usahanya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nirwana et al., 2023) menyatakan bahwa 100% responden tidak

melakukan catatan persediaan sehingganya mereka tidak melakukan pemisahan antara persediaan pribadi dan usaha.

4. Dalam mencatat Aset Tetap perusahaan saya memisahkan antara Aset tetap pribadi dan Aset tetap perusahaan

Tabel 7. Hasil tanggapan responden tentang pencatatan Aset Tetap perusahaan pelaku usaha memisahkan antara Aset tetap pribadi dan Aset tetap perusahaan

Pernyataan	4
Ya	43
Tidak	19

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 7. terdapat 62 responden yang dimana sebanyak 43 responden menjawab “Ya”, menyatakan bahwa responden mencatat Aset Tetap usahanya dan memisahkan antara Aset tetap pribadi dan Aset tetap usaha. Sedangkan 19 responden lainnya menjawab “Tidak”, menyatakan bahwa responden tidak mencatat Aset Tetap usahanya dan tidak memisahkan antara Aset tetap pribadi dan Aset tetap usaha.

Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden selaku pemilik, pengelola, maupun karyawan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sudah menyadari pentingnya pencatatan kas usaha dengan memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, hasil tanggapan dari para responden menyatakan pelaku usaha mempunyai kulkas yang dipakai di tempat usaha dan kulkas yang dipakai di rumah. Pemisahan antara aset pribadi dan aset usaha sangat penting karena sesuai dengan prinsip akuntansi menekankan kejelasan, keteraturan, dan transparansi laporan keuangan. Prinsip entitas bisnis yang terpisah menuntut agar aset dan kewajiban perusahaan dipisahkan dengan jelas dari aset dan kewajiban pribadi pemilik atau individu terkait. Dengan memisahkan kedua jenis aset ini, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangannya akurat mencerminkan kinerja dan posisi keuangan sebenarnya dari entitas bisnis tersebut.

Hasil kuesioner dalam penelitian ini sejalan dengan temuan (Riyani et al., 2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menyadari pentingnya memisahkan aset pribadi dari aset bisnis. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Nirwana et al., 2023), yang mengungkapkan

bahwa para pemilik usaha belum menerapkan konsep dasar akuntansi secara tepat karena tidak melakukan pencatatan penyusutan aset, sehingga aset pribadi dan aset usaha masih tercampur.

5. Dalam mengeluarkan biaya transport untuk pengadaan barang tidak terdapat biaya transportasi untuk kepentingan pribadi

Tabel 8. Hasil tanggapan responden tentang pelaku usaha mengeluarkan biaya transport untuk pengadaan barang tidak terdapat biaya transportasi untuk kepentingan pribadi

Pernyataan	5
Ya	43
Tidak	19

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 8. terdapat 62 responden yang diantaranya sebanyak 43 responden menjawab “Ya”, menyatakan bahwa responden dalam mengeluarkan biaya transport untuk pengadaan barang tidak terdapat biaya transportasi untuk kepentingan pribadi. Sedangkan 19 responden lainnya menjawab “Tidak”, dalam hal ini responden dalam mengeluarkan biaya transport untuk pengadaan barang selalu terdapat biaya transportasi untuk kepentingan pribadi.

Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden selaku pemilik, pengelola, maupun karyawan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sudah menyadari pentingnya pengeluaran biaya transport untuk pengadaan barang dengan tidak memakai biaya transport untuk kepentingan pribadi, hal ini dikarenakan prinsip akuntansi yang mengharuskan aset dan biaya perusahaan dipisahkan secara jelas dari pengeluaran pribadi. Dengan memisahkan biaya transport untuk pengadaan barang, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan biaya yang dihasilkan akurat dan relevan dengan operasi bisnis.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan dalam penelitian ini, dimana sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Husna & Chairunisa, 2023) yang menyatakan bahwa sebagian pelaku UMKM melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan tanpa mencampur adukkan antara pengeluaran biaya pribadi dan biaya usaha. Berbeda dengan penelian yang dilakukan oleh (Nirwana et al., 2023) menyatakan bahwa para pemilik usaha 100% tidak memisahkan antara

biaya pribadi dan biaya usaha, karena ada perhitungan biaya yang seharusnya dipakai untuk keperluan rumah tangga justru dibebankan pada unit usaha seperti biayalistrik dan lain sebagainya.

6. Saya mengakui hutang usaha betul-betul merupakan untuk kepentingan usaha tidak untuk kepentingan pribadi

Tabel 9. Hasil tanggapan responden tentang pelaku usaha mengakui hutang perusahaan betul-betul merupakan untuk kepentingan usaha tidak untuk kepentingan pribadi

Pernyataan	6
Ya	54
Tidak	8

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel

9. terdapat 62 responden yang diantaranya sebanyak 54 responden menjawab “Ya”, menyatakan bahwa responden dalam hal ini mengakui hutang usaha betul-betul merupakan untuk kepentingan usaha tidak untuk kepentingan pribadi. Sedangkan 8 responden lainnya menjawab “Tidak”, dalam hal ini responden tidak mengakui hutang usaha betul-betul merupakan untuk kepentingan usaha melainkan untuk kepentingan pribadi.

Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden selaku pemilik, pengelola, maupun karyawan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sudah menyadari pentingnya utang usaha memang betul-betul untuk kepentingan usaha bukan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, hasil tanggapan dari para responden menyatakan para pelaku usaha melakukan pinjaman bank untuk modal usaha benar-benar untuk usaha bukan kepentingan pribadi, hal ini dikarenakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang menegaskan bahwa kewajiban perusahaan harus terpisah secara jelas dari kewajiban pribadi pemilik atau individu terkait. Dengan mematuhi prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa utang yang diperoleh digunakan untuk mendukung operasi bisnis yang produktif dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan dalam penelitian ini, dimana sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Husna & Chairunisa, 2023) yang menyatakan bahwa sebagian pelaku UMKM melakukan pencatatan terhadap hutang-hutang yang dikeluarkan tanpa mencampur adukkan antara

hutang pribadi dan hutang usaha. Berbeda dengan penelian yang dilakukan oleh (Muchiballah & Wibowo, n.d.) menyatakan bahwa ada atau tidaknya pencatatan hutang tidak berpengaruh terhadap usaha sehingganya para pelaku usaha tidak memisahkan antara hutang usaha dan hutang pribadi.

7. Saya mengakui pendapatan perusahaan untuk perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi

Tabel 10. Hasil tanggapan responden tentang pelaku usaha mengakui pendapatan perusahaan untuk perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi

Pernyataan	7
Ya	50
Tidak	12

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 10. terdapat 62 responden yang diantaranya sebanyak 50 responden menjawab “Ya”, menyatakan bahwa responden dalam hal ini mengakui pendapatan perusahaan untuk perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan 12 responden lainnya menjawab “Tidak”, dalam hal ini responden tidak mengakui pendapatan usaha untuk usahanya melainkan untuk kepentingan pribadi.

Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden selaku pemilik, pengelola, maupun karyawan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sudah menyadari pentingnya pendapatan usaha memang betul-betul untuk penting usaha bukan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, hasil tanggapan dari para responden menyatakan hasil dari penjualan produk usaha masuk sebagai pendapatan usaha bukan untuk pribadi, hal ini dikarenakan sesuai dengan prinsip dasar dalam akuntansi menekankan bahwa pendapatan yang diperoleh harus secara jelas terpisah antara kegiatan bisnis dengan kegiatan pribadi pemilik atau individu terkait. Dengan memisahkan kedua jenis pendapatan ini, para pelaku usaha dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan secara akurat kinerja bisnis yang sebenarnya. Hal ini tidak hanya memenuhi standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga mendukung transparansi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan dalam penelitian ini, dimana sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Husna & Chairunisa, 2023) yang menyatakan bahwa beberapa pelaku usaha memisahkan antara pendapatan pribadi dan pendapatan usahanya dikarenakan mereka ingin mengetahui semua pendapatan atas penjualan dalam usahanya. Berbeda dengan penelian yang dilakukan oleh (Muchiballah & Wibowo, n.d.) menyatakan bahwa para pelaku usaha tidak memisahkan antara pendapatan pribadi dan pendapatan usaha hal ini dikarenakan pendapatan yang tidak seberapa juga menjadi penghalang bagi mereka untuk memahami konsep ini tidak penting. Sama halnya dengan penelitian menurut (Towak, 2024) menyatakan bahwa para pelaku usaha terus menggunakan pendapatannya untuk pengeluaran pribadi.

8. Saya tidak mencampur adukkan biaya perusahaan dengan biaya untuk kepentingan pribadi

Tabel 11. Hasil tanggapan responden tentang pelaku usaha tidak mencampur adukkan biaya perusahaan dengan biaya untuk kepentingan pribadi

Pernyataan	8
Ya	49
Tidak	13

Sumber : Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 11. terdapat 62 responden yang diantaranya sebanyak 49 responden menjawab “Ya”, menyatakan bahwa responden dalam hal tidak mencampur adukkan biaya usaha dengan biaya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan 13 responden lainnya menjawab “Tidak”, dalam hal ini responden mencampur adukkan biaya usaha dengan biaya untuk kepentingan pribadi.

Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden selaku pemilik, pengelola, maupun karyawan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sudah menyadari pentingnya untuk tidak mencampur adukkan biaya usaha dengan biaya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, hasil tanggapan dari para responden menyatakan biaya listrik untuk tempat usaha dan biaya listrik untuk rumah memang dipisahkan, selanjutnya juga seperti biaya pembelian bahan baku untuk usaha benar-benar untuk usaha bukan untuk biaya

belanja bulanan untuk pribadi. Hal ini dikarenakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang menekankan kejelasan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan memisahkan kedua jenis biaya ini, para pelaku usaha dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan dengan akurat biaya yang terkait dengan operasi bisnis yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan dalam penelitian ini, dimana sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Husna & Chairunisa, 2023) yang menyatakan bahwa sebagian pelaku UMKM melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan tanpa mencampurkan antara pengeluaran biaya pribadi dan biaya usaha. Namun dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nirwana et al., 2023) menyatakan bahwa para pemilik usaha tidak memisahkan antara biaya usaha dan biaya sendiri, karena ada perhitungan biaya yang seharusnya dipakai untuk keperluan rumah tangga justru dibebankan pada unit usaha seperti biaya listrik dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini berimplikasi pada Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) terkait konsep kesatuan usaha (Economic Entity Concept), yang menyatakan bahwa pelaku usaha mikro harus diperlakukan sebagai entitas yang mandiri dan terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, usaha mikro dan pemiliknya dianggap sebagai entitas yang melakukan transaksi secara terpisah.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara umum menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku usaha mikro menyadari pentingnya pembukuan atau akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, serta kesadaran mereka tentang pentingnya memisahkan pencatatan antara aset usaha dan aset pribadi. Secara khusus, penelitian ini menyimpulkan meskipun para pelaku usaha mikro di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, telah memahami bahwa pemisahan antara milik pribadi dan milik usaha penting, tetapi adapula beberapa pelaku usaha yang tidak mengimplementasikan untuk pemisahan antara milik pribadi dan milik usaha sehingganya pada usaha mikro masih kurang

maksimal sehingganya penerapan konsep entitas pun kurang maksimal, yang secara presentase sebesar 70% sudah menerapkan konsep entitas dalam menjalankan usahanya dan sisanya 30 belum sepenuhnya menerapkan konsep entitas.

Kemudian sesuai dengan hasil penelitian disarankan agar para pelaku usaha mikro lebih sering memisahkan pencatatan antara milik pribadi dan milik usaha. Langkah ini akan membantu usaha mikro memahami dan mematuhi standar yang telah ditetapkan dalam pelaporan keuangan melalui tinjauan konsep entitas. Walaupun penelitian ini melibatkan 68 sampel dari berbagai jenis industri, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif dengan menggunakan alat ukur yang lebih representatif dari populasi yang ada. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan studi lebih lanjut dengan menerapkan instrumen yang lebih spesifik untuk mengukur tingkat kesadaran mengenai aspek keuangan usaha mikro.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Husna, D. R., & Chairunisa, D. (2023). Analisis penerapan teori akuntansi pada usaha toko barang harian ayang galeri di kecamatan langsa kota. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 356–363.
- Irawan, R. (2013). Aspek Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *The 6th NCFB and Doctoral Colloquium, Unika Widya Mandala Surabaya*.
- Mangopa, S., Tuli, H., & Mahmud, M. (2020). Analisis Penerapan SAK-EMKM Persediaan Pada Usaha Mikro & Kecil Sektor Ritel Barang Harian. *Jambura Accounting Review*, 1(2), 70–83. <https://doi.org/10.37905/jar.v1i2.12>
- Muchiballah, Q. N. A., & Wibowo, D. (n.d.). *ANALISIS KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN ECONOMIC ENTITY CONCEPT PADA USAHA MIKRO*.
- Murtiningtyas, T. (2013). Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UKM di Kelurahan Blimbing dan Lowokwaru Malang). *The 6th NCFB and Doctoral Colloquium Unika Widya Mandala Surabaya*.

- Nirwana, M., Mursidah, M., Khadafi, M., & Mardiyaton, M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pengolahan Gula Aren di Desa Cinta Damai Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 304. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.12067>
- Risnarningsih, R. (2017). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.97>
- Riyani, E. I., Tantri, S. N., Hardiana, N., Widiastuti, Y., & Muktiyanto, A. (2023). Effective Bookkeeping Using Online-Based Application to Leverage the Competitive Advantage of MSMEs in Ciledug District. *Journal of Community Development in Asia (JCDA)*, 6(2), 113–127.
- Towak, A. (2024). *Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)*.
- Tuli, H. (2021). Konsep Entitas Bagi Usaha Sampingan Ibu Rumah Tangga. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v1i1.2>
- Warsono, S., Murti, E., Ridha, A., & Darmawan, A. (2010). Akuntansi UMKM. *Asgard Chapter Yogyakarta*.